LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI RIAU TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau menyusun Laporan Kinerja yang disampaikan kepada Gubernur Riau melalui Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Riau.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilakukan guna mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2020. Laporan ini menyajikan analisis realisasi kinerja sasaran, sekaligus sebagai bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Dengan Laporan Kinerja ini, diharapkan adanya optimalisasi peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dalam melaksanakan tugas, peran dan fungsinya, sehingga mendukung kinerja Pemerintah Provinsi Riau mewujudkan *Good Governance dan Clean Government.*

Pekanbaru, Januari 2021

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN PROVINSI RIAU

MAMUN MUROD
Pembina Utama Madya
NIP. 19660610 199203 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

DAFTAR TABEL ..... **iii**

BAB I PENDAHULUAN **I.1**

1.1 LATAR BELAKANG I.1

1.2 STRUKTUR ORGANISASI I.3

1.3 TUGAS DAN FUNGSI I.16

1.4 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI I.18

1.5 PERMASALAHAN UTAMA I.19

BAB II PERENCANAAN KINERJA **II.1**

2.1 RENCANA STRATEGIS II.1

2.2 PERJANJIAN KINERJA II.8

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA **III.1**

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI III.1

3.2 REALISASI ANGGARAN III.27

BAB IV PENUTUP **IV.1**

4.1 KESIMPULAN UMUM IV.1

4.2 LANGKAH STRATEGIS IV.2

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2020 2024	II.2
Tabel 2.2.	Perjanjian Kinerja Tahun 2020	II.9
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	III.1
Tabel 3.2	Target dan realisasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tahun 2020	III.2
Tabel 3.3	Realisasi kinerja dan capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tahun 2019 dan 2020	III.4
Tabel 3.4	Realisasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tahun 2020 dibandingkan dengan target Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2020 – 2024 ..	III.5
Tabel 3.5	Realisasi kinerja dibandingkan dengan anggaran yang digunakan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tahun 2020 ……	III.18

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi tahun 2020 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terstruktur dengan sasaran/ target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Sedangkan Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/ APBD).

Pemerintahan yang baik merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam menyediakan barang-barang dan jasa-jasa publik (*public goods and services*). Pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitemate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Upaya mewujudkan pemerintahan yang baik, yang efektif menuntut adanya

koordinasi yang baik dan integritas, profesionalitas serta etos kerja dan moral yang tinggi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Selain itu, LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang baik. Dalam persepektif yang lebih luas, LKjIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Kewajiban membuat LKjIP dapat mendorong terselenggaranya pemerintahan yang baik dan bersih. Sebaliknya, LKjIP yang baik haruslah didahului dengan tercapainya secara baik sasaran kinerja instansi pemerintah sesuai perencanaan, rencana jangka menengah lima tahunan, rencana tahunan, dan perjanjian kinerja. Capaian kinerja sesuai rencana itulah yang merupakan inti LKjIP. Tidak mungkin dibuat LKjIP yang baik kalau kinerja instansi pemerintah tidak mampu mencapai sasaran dengan baik sesuai rencana kinerja dan perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2020 ini disusun berdasarkan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024 Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2019-2024, mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan memerhatikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Realisasi yang dilaporkan dalam LKjIP ini merupakan hasil kegiatan Tahun 2020 yang merupakan kinerja tahun terakhir pelaksanaan RPJMD tahun 2019-2024 dan RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2019-2024. LKjIP Tahun 2020 ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen

perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran RPJMD dan RENSTRA, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasannya yang memadai atas kinerja, dan pembandingan capaian indikator kinerja.

1.2. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau sesuai 1) Peraturan Gubernur Riau Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau; 2) Peraturan Gubernur Riau Nomor 52 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau; dan 3) Peraturan Gubernur Riau Nomor 76 Tahun 2019 tentang Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, yaitu:

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Sekretariat, terdiri atas :
    a. Sub Bagian Perencanaan Program
    b. Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah
    c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
3. Bidang Penaatan dan Penataan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terdiri atas :
    a. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan
    b. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
    c. Seksi Penegakan Hukum
4. Bidang Perubahan Iklim, Pengelolaan Limbah Padat Domestik dan Peningkatan Kapasitas, terdiri atas :
    a. Seksi Pengendalian Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan
    b. Seksi Pengelolaan Limbah Padat Domestik
    c. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terdiri atas :
   a. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan
   b. Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan
   c. Seksi Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya Beracun.
6. Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, terdiri atas :
   a. Seksi Perencanaan dan Tata Hutan
   b. Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan
   c. Seksi Pengolahan, Pemasaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak
7. Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Restorasi Gambut dan Pemberdayaan Masyarakat, terdiri atas :
   a. Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
   b. Seksi Restorasi Gambut, Rehabilitasi Hutan dan Lahan
   c. Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Perhutanan Sosial
8. UPT. Laboratorium Lingkungan, terdiri atas :
   a. Sub Bagian Tata Usaha
   b. Seksi Pengendalian Mutu
   c. Seksi Pengujian
9. UPT. Pelatihan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat, terdiri atas :
   a. Sub Bagian Tata Usaha
   b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
   c. Seksi Pelatihan Kehutanan
10. UPT. Pembenihan Tanaman Hutan, terdiri atas :
    a. Sub Bagian Tata Usaha
    b. Seksi Konservasi Sumberdaya Genetika dan Pemuliaan Tanaman
    c. Seksi Produksi, Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit
11. UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Model Minas Tahura, terdiri atas:
    a. Sub Bagian Tata Usaha
    b. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
    c. Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat

12. UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Tasik Besar Serkap, terdiri atas:
    a. Sub Bagian Tata Usaha
    b. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
    c. Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat.
13. UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Bagan SiApi-api, terdiri atas :
    a. Sub Bagian Tata Usaha
    b. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
    c. Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat.
14. UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Bengkalis Pulau, terdiri atas:
    a. Sub Bagian Tata Usaha
    b. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
    c. Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat.
15. UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Mandau, terdiri atas :
    a. Sub Bagian Tata Usaha
    b. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
    c. Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat.
16. UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Rokan, terdiri atas :
    a. Sub Bagian Tata Usaha
    b. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
    c. Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat.
17. UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Suligi Batu Gajah, terdiri atas :
    a. Sub Bagian Tata Usaha
    b. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
    c. Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat.
18. UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Kampar Kiri, terdiri atas:
    a. Sub Bagian Tata Usaha
    b. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
    c. Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat.
19. UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Sorek, terdiri atas:
    a. Sub Bagian Tata Usaha
    b. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
    c. Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat.

20. UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Tebing Tinggi, terdiri atas:
    a. Sub Bagian Tata Usaha
    b. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
    c. Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat.
21. UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Mandah, terdiri atas:
    a. Sub Bagian Tata Usaha
    b. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
    c. Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat.
22. UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Indragiri, terdiri atas:
    a. Sub Bagian Tata Usaha
    b. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
    c. Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat.
23. UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Singingi, terdiri atas:
    a. Sub Bagian Tata Usaha
    b. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
    c. Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat.

BAGAN ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN PROVINSI RIAU

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR : 74 TAHUN 2016
TANGGAL : 16 DESEMBER 2016

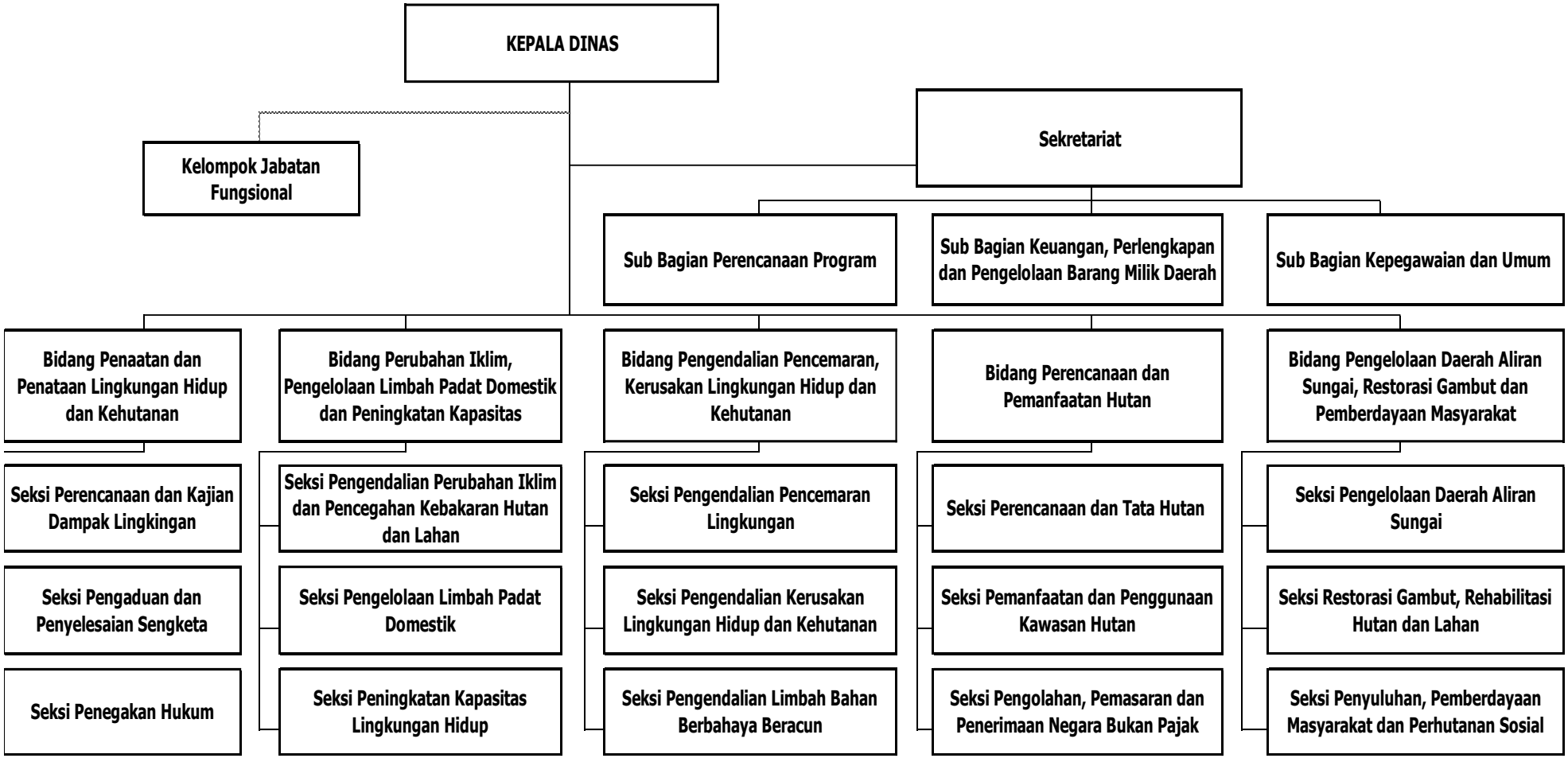

BAGAN ORGANISASI UPT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN PROVINSI RIAU

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR : 52 TAHUN 2017 DAN
76 TAHUN 2017
TANGGAL : 07 NOVEMBER 2017 DAN
27 DESEMBER 2017

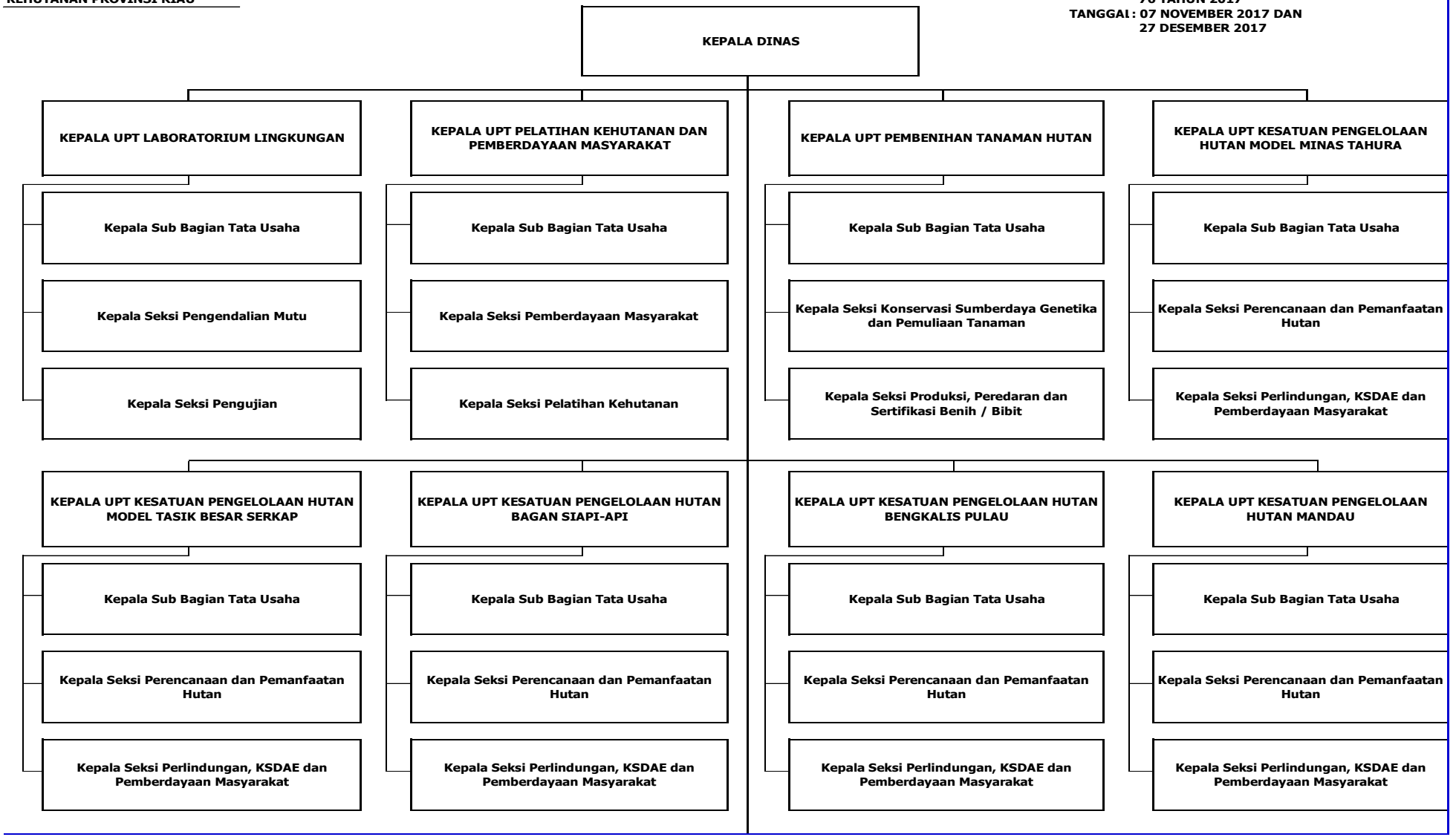

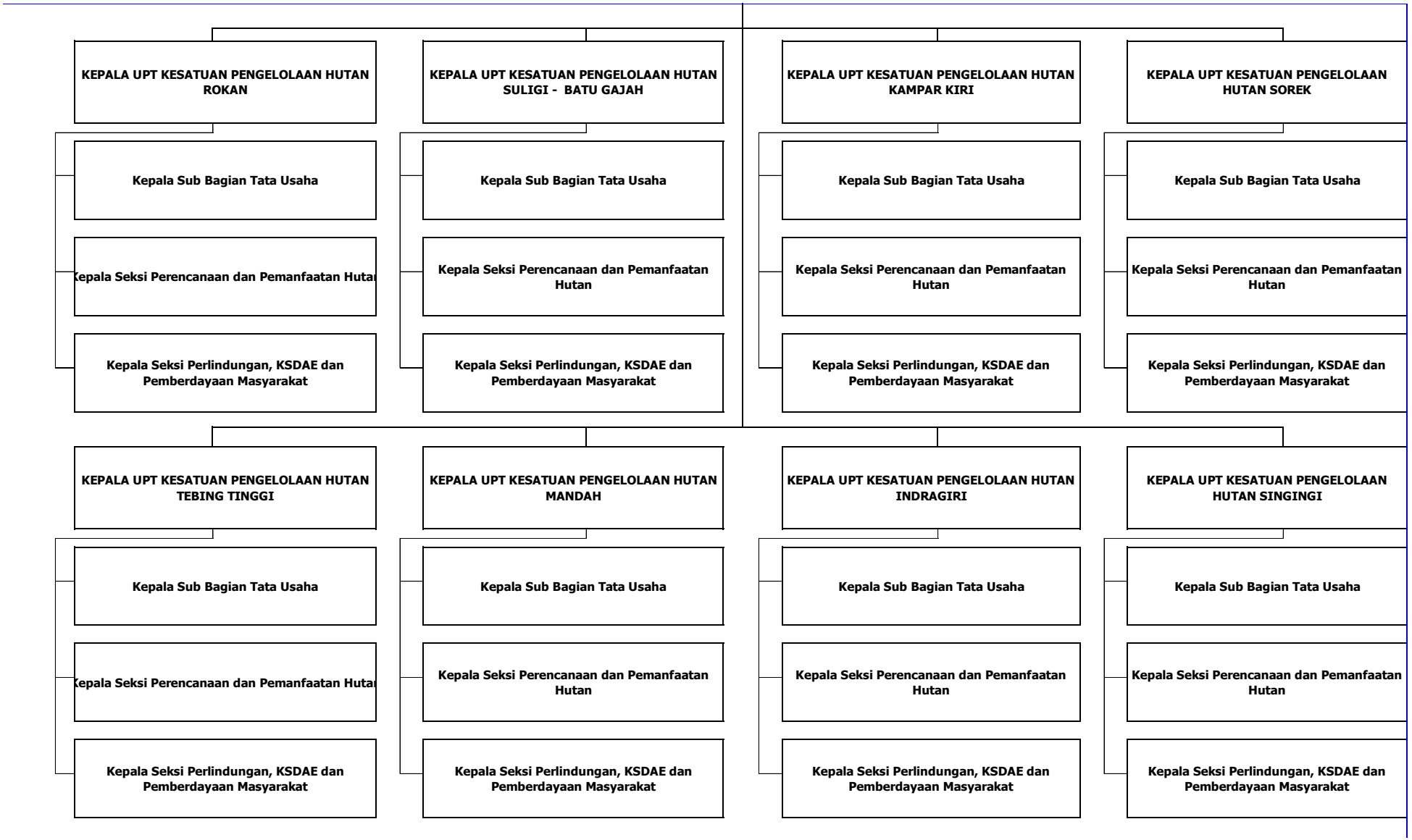
KEPALA UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN ROKAN
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
Kepala Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat
KEPALA UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SULIGI - BATU GAJAH
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
Kepala Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat
KEPALA UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KAMPAR KIRI
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
Kepala Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat
KEPALA UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SOREK
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
Kepala Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat
KEPALA UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN TEBING TINGGI
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
Kepala Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat
KEPALA UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN MANDAH
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
Kepala Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat
KEPALA UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN INDRAGIRI
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
Kepala Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat
KEPALA UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SINGINGI
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
Kepala Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat

Sumber daya yang ada di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau telah mencukupi untuk mendukung tercapainya sasaran pembangunan kehutanan di Provinsi Riau.

a) Jumlah Pegawai

Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2020 adalah sebanyak 817 orang.

b) Kualifikasi Pendidikan

Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3. Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Tahun 2020

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Sekolah Dasar (SD)	5
2	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	3
3	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	350
4	Diploma (D3)	16
5	Diploma (D4)	13
6	Sarjana (S1)	332
7	Pasca Sarjana (S2)	95
8	Pasca Sarjana (S3)	3
	Jumlah	**817**

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, 2020

c) Pangkat dan Golongan

Berdasarkan Pangkat dan Golongan Pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.4. Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2020

NO	PANGKAT / GOLONGAN	JUMLAH
1	Golongan I / Juru	2
2	Golongan II / Pengatur	199
3	Golongan III / Penata	536
4	Golongan IV / Pembina	80
	Jumlah	**817**

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, 2020

d) Pejabat Struktural

Berdasarkan Eselon Pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.5. Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau berdasarkan eselon Tahun 2020.

ESELON				JUMLAH
I	II	III	IV	
-	1	22	66	89

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, 2019

e) Fungsional

Terdapat 5 (lima) jenis jabatan fungsional di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

Tabel 1.6. Jumlah Pejabat Fungsional Tertentu pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2020

NO	NAMA JABATAN	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	JUMLAH
1	**Perencana**		**4**
		○ Ahli Madya	1
		○ Ahli Muda	3
2	**Pengelola Pengadaan Barang/Jasa**		**1**
		○ Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda	1
3	**Analis Kepegawaian**		**3**

NO	NAMA JABATAN	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	JUMLAH
		○ Analis Kepegawaian Pertama	3
4	**Pengawas Lingkungan Hidup**		
		○ Pengawas Lingkungan Hidup Muda	**3**
5	**Pengendali Dampak Lingkungan**		**1**
		○ Pengendali Dampak Lingkungan Muda	1
6	**Polisi Kehutanan**	**Ahli**	**33**
		- Ahli Madya	10
		- Ahli Muda	13
		- Ahli Pertama	10
		Terampil	**60**
		- Penyelia	28
		- Pelaksana lanjutan	18
		- Pelaksana	19
		- Pelaksana Pemula	5
	Jumlah JFT Polisi Kehutanan		**103**
7	**Penyuluh**	**Ahli**	**12**
		- Ahli Madya	2
		- Ahli Muda	9
		- Ahli Pertama	1
		Terampil	
		- Penyelia	3
		- Pelaksana lanjutan	6
		- Pelaksana	8
	Jumlah JFT Penyuluh		**29**
	Jumlah Total		**145**

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, 2020

f) Jenis Kelamin

Berdasarkan Jenis Kelamin Pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.7. Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1	Laki-laki	626
2	Perempuan	191
	Jumlah	**817**

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, 2020

1.3. Tugas dan Fungsi

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau memiliki dua urusan pemerintahan yang menjadi tugas pokok dan fungsi berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu urusan Lingkungan Hidup yang merupakan Urusan wajib dan Urusan Kehutanan yang menjadi urusan pilihan, adapun kewenangan pemerintah provinsi pada masing-masing urusan adalah sebagai berikut :

❖ **URUSAN LINGKUNGAN HIDUP**

1) Perencanaan Lingkungan Hidup
2) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
3) Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
4) Keanekaragaman Hayati (Kehati)
5) Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
6) Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
7) Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH
8) Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

9) Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
10) Pengaduan Lingkungan Hidup
11) Persampahan.

❖ **URUSAN KEHUTANAN**

1) Pengelolaan Hutan
2) Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
3) Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
4) Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan.

Sesuai Peraturan Gubernur Riau Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

   Tugas Pokok Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau adalah membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

2. Fungsi

   1) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Penaatan dan Penataan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bidang Perubahan Iklim, Pengelolaan Limbah Padat Domestik dan Peningkatan Kapasitas, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, dan Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Restorasi Gambut dan Pemberdayaan Masyarakat.

2) Pelaksanaan evaluasi dan administrasi pada Sekretariat, Bidang Penaatan dan Penataan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bidang Perubahan Iklim, Pengelolaan Limbah Padat Domestik dan Peningkatan Kapasitas, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, dan Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Restorasi Gambut dan Pemberdayaan Masyarakat.
3) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.4. Aspek Strategis Organisasi

Aspek Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu terwujudnya lingkungan hidup berkualitas yang merupakan indikator pencapaian tujuan dan sasaran utama yang selaras dengan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD Provinsi Riau 2019-2024 yaitu :

1. meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
   1) Meningkatnya Kualitas Air
   2) Meningkatnya Kualitas Udara
   3) Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan
2. Menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK).
   1) Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Limbah (%)
   2) Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan (%)

Tabel. 1.8. Capaian IKLH dan Emisi GRK Tahun 2015 s.d Tahun 2019

NO	INDIKATOR	2015	2016	2017	2018	2019
I	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)**	**53.07**	**56.73**	**68.64**	**68.43**	**62.47**
1	Indeks Kualitas Udara (IKU)	60.30	72.4	90.9	89.91	90.47
2	Indeks Kualitas Air (IKA)	46.39	50.75	65.23	73.68	53.55
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	52.66	49.45	54.51	48.37	48.15
II	**Persentase Penurunan Emisi GRK**	**239,227.80**	**198,174.29**	**200,535.65**	**204,302.42**	**161,701.48**
1	Persentase Penurunan Emisi GRK S ektor Limbah	5,699.24	5,949.53	5,971.18	5,711.61	5,883.91
2	Persentase Penurunan Emisi GRK Sektor Kehutanan	151,602.08	115,061.98	124,988.90	125,871.09	82,814.68

1.5. Permasalahan Utama

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya adalah:

1. Kualitas Sumberdaya aparatur baik perencana dan teknis yang memiliki kompetensi relatif masih terbatas;
2. Masih rendahnya kesadaran, pemahaman, komitmen, dan partisipasi pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan serta pemanfaatan sumber daya alam;
3. Koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah masih belum optimal;

4. Belum tersedianya perencanaan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan yang komprehensif sebagai bahan penyusunan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan Femanfaatan dan Perencanaan kehutanan;
5. Belum optimalnya penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
6. Masih kurangnya fasilitas pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan termasuk fasilitas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan kehutanan;
7. Ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup dan kehutanan yang kurang memadai.

Tabel 1.9. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1.	Pencemaran lingkungan	Terjadinya polusi terhadap lingkungan baik air, udara dan tanah	Kualitas lingkungan hidup yang kurang baik
2.	Masih rendahnya penanganan lahan kritis dan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Penanganan lahan kritis belum maksimal karena keterbatasan anggaran, terjadinya kerusakan lingkungan yang terus menerus, terjadinya kebakaran hutan dan lahan dan rendahnya kualitas pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Lahan kritis akan terus menerus terjadi
3.	Masih rendahnya kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan	Pembinaan dan fasilitasi pemerintah terhadap Kelompok tani hutan masih rendah	Penangan Hutan Lestari dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan belum sejalan
4.	Penanganan potensi lingkungan dan kehutanan belum sesuai dengan asas kelestarian	Banyak potensi-potensi lingkungan dan kehutanan belum terkelola	Kelestarian hutan tingkat tapak belum berjalan dengan baik

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
5	Tingginya pelanggaran Hukum dibidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha terhadap bahaya perusakan lingkungan hidup. Semakin terbatasnya Lahan untuk dijadikan tempat usaha yang menyebabkan tingginya perambahan kawasan hutan.	Jumlah SDM terkait penegakan hukum bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan masih terbatas
6	Tidak terkendalinya perubaan iklim yang mengakibatkan terjadinya Karhutla	Pembukaan lahan perkebunan secara besar-besaran dan kebakaran hutan di lahan gambut	Kualitas lingkungan hidup yang kurang baik

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2019-2024 adalah **"Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (RIAU BERSATU)"**

Misi Gubernur Wakil Gubernur Riau Tahun 2019-2024 Riau yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau adalah misi ke-2 yaitu **"Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan."**

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2019-2024 merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja. Rencana strategis yang disusun oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau mengandung tujuan, sasaran, serta memuat strategi disertai program dan kegiatan dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanan yang bersifat indikatif.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau telah menyusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2019-2024.

Rencana Strategis yang telah disusun terstuktur sebagai gambaran komitmen Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau untuk mewujudkan kinerja aparatur dan kelembagaan yang akomodatif terhadap tuntutan masyarakat atas pelayanan yang mudah, transparan, akuntabel dan mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau telah merumuskan tujuan dan sasaran strategis yang merupakan bagian integral dalam proses rencana strategis organisasi untuk mencapai target Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD tahun 2020 - 2024, sebagai berikut:

Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2020-2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	**Meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67,62	68,00	68,35	68,70	69,08
		Meningkatnya Kualitas **Air**	Indeks Kualitas Air (Poin)	58,30	58,60	58,80	59,00	59,20
		Meningkatnya Kualitas **Udara**	Indeks Kualitas Udara (Poin)	90,30	90,60	90,90	91,20	91,60
		Meningkatnya Tutupan **Lahan**	Indeks Tutupan Lahan (Poin)	57,59	58,09	58,59	59,09	59,59
2	**Menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca di Provinsi Riau**		Persentase Penurunan Emisi GRK (%)	1	1	1	1	1
		Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca **Sektor Limbah**	Persentase Penurunan Emisi GRK Sektor Limbah (%)	1	1	1	1	1
		Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca **Sektor Kehutanan**	Persentase Penurunan Emisi GRK Sektor Kehutanan (%)	1	1	1	1	1

Sumber : Rencana Strategi (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau 2019-2024

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran kinerja sebagaimana tabel 2.1 diatas, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau telah menyusun Program dan Kegiatan Tahun 2020 yang terdiri daru 2 (dua) urusan yaitu **urusan wajib** Lingkungan Hidup dan **urusan pilihan** Kehutanan, dengan Program Kegiatan sebagai berikut:

1. URUSAN WAJIB NON SPM LINGKUNGAN HIDUP

a) Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup.

1. Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura
2. Pemantauan Kualitas Lingkungan
3. Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih
4. Koordinasi Pengendalian Pencemaran Limbah Padat dan Domestik Provinsi Riau
5. Pameran Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Riau Expo
6. Penataan dan Penanganan Kasus Lingkungan Hidup
7. Penilaian, Pembinaan dan Pengawasan AMDAL
8. Pengawasan Izin Lingkungan
9. Asistensi KLHS Kabupaten/Kota
10. Pembinaan Pengelolaan B3 dan Limbah B3
11. Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
12. Penyusunan DED dan Izin Lingkungan Laboratorium Lingkungan UPT. Laboratorium Lingkungan
13. Pengembangan Sarana dan Prasarana UPT. Laboratorium Lingkungan
14. Pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup
15. Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
16. Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Provinsi Riau (d/h SLHD)
17. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

18. Pengembangan Kearifan Lokal
19. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem
20. Pembinaan dan Pengembangan Program Kampung Iklim Provinsi Riau
21. Identifikasi Pengembangan dan Pengelolaan Program Riau Hijau di Provinsi Riau
22. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi dan Pemulihan Kawasan Bekas Tambang Rakyat
23. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalamPengendalian Kerusakan Ekosistem Kawasan Pesisir dan Laut
24. Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT, Laboratorium Lingkungan
25. Pengelolaan Data Informasi dan Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan
26. Penyusunan Profil Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Provinsi Riau
27. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Lingkungan Hidup
28. Pengadaan Alat/Sistem Pemantauan Kualitas Air secara Kontinyu, Otomatis dan Online (Khusus Provinsi) (DAK)

2. URUSAN PILIHAN KEHUTANAN

a) Program Pemanfaatan Dan Penggunaan Kawasan Hutan

1. Monitoring dan Validasi Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) Badan Usaha Bidang Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat
2. Peningkatan Pemanfaatan Hasil Hutan Hutan Hak/Rakyat
3. Asistensi Pengendalian Pelaksanaan RKU, RKT dan RPHD pada Perizinan Perhutanan Sosial.
4. Penyuluhan dan Pengawasan Perlindungan Hutan pada Hutan Adat/HKm/Desa
5. Penyusunan desain tapak pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam di wilayah UPT KPH Rokan

6. Pengembangan jasa Ekowisata Sungai bersama masyarakat sekitar KPH Tasik besar serkap
7. Pengembangan dan pemeliharaan pengelolaan
8. sarana prasarana wisata tahura SSH
9. Inventarisasi Potensi Ekowisata dan Jasa Lingkungan
10. di UPT KPH Suligi Batu Gajah
11. Pengembangan Perhutanan Sosial di Provinsi Riau
12. Penanganan, Pengukuran, dan Pengujian Perambahan Kawasan Hutan dan Hasil Hutan Ilegal
13. Peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPHP Minas Tahura
14. Peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT pelatihan kehutanan dan pemberdayaan masyarakat
15. Peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT perbenihan tanaman hutan
16. Peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Bengkalis Pulau
17. Peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Mandau
18. Peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Rokan
19. Peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Kampar Kiri
20. Peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Sorek
21. Peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Tebing tinggi
22. Peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Mandah
23. Peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Indragiri

24. Peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Singingi
25. Peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Tasik Besar Serkap
26. Peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Bagan Siapi Api
27. Peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Suligi Batu Gajah
28. Rekonsiliasi PNBP (Peningkatan Penerimaan Negara) Sektor Kehutanan
29. Pengembangan Perbenihan
30. Pelatihan dan Peningkatan Kualitas Kelompok Masyarakat Terkait Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

b) Program Perlindungan Dan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan

1. Pengembangan tanaman lokal dan tanaman serba guna (MPTS) di kawasan areal masyarakat hutan adat
2. Aksi serentak menanam pohon dan penghijauan dan konservasi alam Provinsi Riau
3. Pengembangan Sarana dan Prasarana Persemaian
4. Pengembangan Data dan informasi Daerah Aliran Sungai
5. Penanganan dan penyelesaian perkara /kasus tindak pidana kehutanan
6. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Sumber Dana DBH-DR
7. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Riau
8. Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Provinsi Riau
9. Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat
10. Perlindungan dan Pengamanan Hutan
11. Patroli Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
12. Pengembangan Sarana Prasarana Pengendalian

13. Kebakaran Hutan dan Lahan
14. Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla UPT KPH Suligi - Batu Gajah
15. Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla UPT KPH Model Tasik Besar Serkap
16. Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla UPT KPH Bagan Siapi-api
17. Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla UPT KPH Bengkalis Pulau
18. Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla UPT KPH Mandau
19. Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla UPT KPH Rokan
20. Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla UPT KPHP Minas Tahura
21. Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla UPT KPHP Kampar Kiri
22. Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla UPT KPHP Sorek
23. Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla UPT KPHP Tebing Tinggi
24. Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla UPT KPHP Mandah
25. Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla UPT KPHP Indragiri
26. Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla UPT KPHP Singingi

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Menurut petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam Permenpan No. 53 Tahun 2014, perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Kepala Daerah sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan OPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Kepala Derah sebagai pemberi amanah dan Pimpinan OPD sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun Perjanjian Kinerja antara Gubernur Riau dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Tutupan Lahan	Indeks tutupan lahan	57,59
2.	Meningkatnya Kualitas Air	Indeks kualitas air	58,30
3.	Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks kualitas udara	90,30
4.	Menurunnya Emisi GRK Sektor Limbah	Persentase Penurunan Emisi GRK Sektor Limbah	1%
5.	Menurunnya Emisi GRK Sektor Kehutanan	Persentase Penurunan Emisi GRK Sektor Kehutanan	1%

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.942.078.200	APBD
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	455.250.000	APBD
3	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	11.706.438.076	APBD
4	Program Pemanfaatan dan Penggunanaan Kawasan Hutan	8.326.645.070	APBD
5	Program Perlindungan dan Rahabilitasi Hutan dan Lahan	24.477.462.216	APBD
	JUMLAH	**50.907.873.562**	

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tahun 2020 diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tahun 2020 yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dengan Gubernur Riau sebagaimana yang terdapat pada lampiran 1.

Penilaian terhadap Perjanjian Kinerja ini dilakukan dengan memperhatikan pengelolaan program dan kegiatan dengan mengevaluasi dan mengukur kinerja. Ukuran kinerja dilakukan dengan pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data, selanjutnya dilakukan evaluasi, dimana dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja seperti pada tabel 3.1. berikut.

Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 ≤ 100	Sangat tinggi
2	76 ≤ 90	Tinggi
3	66 ≤ 75	Sedang
4	51 ≤ 65	Rendah
5	≤ 50	Sangat rendah

Dalam Penilaian Kinerja tersebut di atas, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Hasil sangat tinggi dan tinggi berarti pencapaian / realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja
2. Hasil sedang berarti pencapaian / realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal
3. Hasil rendah dan sangat rendah berarti pencapaian / realisasi kinerja capaian belum memenuhi / masih di bawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Pada tahun 2020, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap program dan kegiatan yang dialokasikan dalam belanja langsung, secara umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau telah mencapai kinerja tujuan kategori **sangat tinggi** di bidang pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan.

Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.2. Target dan realisasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	67,62	68.94	101,95
a	Meningkatnya tutupan lahan	Indeks tutupan lahan	57,59	41,24	71,61
b	Meningkatnya kualitas air	Indeks kualitas air	58,30	50,23	86,16
c	Meningkatnya kualitas udara	Indeks kualitas udara	90,30	90,42	100,13
2	Menurunnya emisi GRK	Persentase penurunan emisi GRK	1,00%	1,35%	135,00

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
a	Menurunnya emisi GRK sektor limbah	Persentase penurunan emisi GRK sektor limbah	1,00%	1,03%	103,00
b	Menurunnya emisi GRK sektor kehutanan	Persentase penurunan emisi GRK sektor kehutanan	1,00%	1,14%	114,00

Dari tabel di atas terlihat, bahwa realisasi dari target seluruh sasaran strategis dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tahun 2020 nilainya sangat tinggi, yaitu sasaran strategis Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dengan indikator kinerja IKLH dari target 67,62 terealisasi 70,73 (104,59) dan Menurunnya emisi GRK dari target 1% terealisasi 1,35% (135,00).

Pada sasaran strategis Meningkatnya IKLH terdiri dari 3 indikator, yaitu indeks tutupan lahan, indeks kualitas air dan indeks kualitas udara. Sedangkan pada sasaran strategis Menurunnya emisi GRK terdiri dari 2 indikator, yaitu persentase penurunan emisi GRK sektor limbah dan persentase penurunan emisi GRK sektor kehutanan.

Jika dibandingkan realisasi kinerja dan capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tahun 2020 dengan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3. Realisasi kinerja dan capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tahun 2019 dan 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2019			Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	61,99	62,47	100,77	67,62	70,73	104,59
a	Meningkatnya tutupan lahan	Indeks tutupan lahan		48,15		57,59	41,24	71,61
b	Meningkatnya kualitas air	Indeks kualitas air		53,55		58,30	58,54	100,41
c	Meningkatnya kualitas udara	Indeks kualitas udara		90,47		90,30	90,36	100,07
2	Menurunnya emisi GRK	Persentase penurunan emisi GRK				1,00%	1,35%	135,00
a	Menurunnya emisi GRK sektor limbah	Persentase penurunan emisi GRK sektor limbah				1,00%	1,03%	103,00
b	Menurunnya emisi GRK sektor kehutanan	Persentase penurunan emisi GRK sektor kehutanan				1,00%	1,14%	114,00

Dari tabel di atas terlihat, bahwa indikator kinerja IKLH tahun 2019 dari target sebesar 61,99 terealisasi sebesar 62,47 dan tahun 2020 dari target sebesar 67,62 terealisasi sebesar 70,73. Hal ini berarti, bahwa IKLH Provinsi Riau dari tahun 2019 ke tahun 2020 ada peningkatan sebesar 8,26. Untuk indikator penurunan emisi GRK pada tahun 2019 tidak ada karena tidak menjadi indikator kinerja yang ditetapkan saat itu, sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2020. Tahun 2020 ini merupakan tahun pertama dari Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Tahun 2020 – 2024, sehingga ada indikator kinerja yang tidak ditetapkan pada Rencana Strategis sebelumnya.

Realisasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tahun 2020, jika dibandingkan dengan target Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4. Realisasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tahun 2020 dibandingkan dengan target Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2020 - 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun 2020	Capaian Tahun 2020 terhadap Target Akhir Renstra
1	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69,08	68,94	99,80
a	Meningkatnya tutupan lahan	Indeks tutupan lahan	59,59	41,24	69,21
b	Meningkatnya kualitas air	Indeks kualitas air	59,20	58,54	98,89
c	Meningkatnya kualitas udara	Indeks kualitas udara	91,60	90,36	98,65
2	Menurunnya emisi GRK	Persentase penurunan emisi GRK	5,00%	1,35%	27,00
a	Menurunnya emisi GRK sektor limbah	Persentase penurunan emisi GRK sektor limbah	5,00%	1,03%	20,60
b	Menurunnya emisi GRK sektor kehutanan	Persentase penurunan emisi GRK sektor kehutanan	5,00%	1,14%	22,80

Pada tabel di atas dapat dilihat, bahwa realisasi indikator kinerja IKLH tahun 2020 jika dibandingkan dengan target indikator kinerja IKLH pada Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tahun 2020 – 2024 telah mencapai sebesar 99,80 atau telah mencapai sebesar 68,94 dari target sebesar 69,08.

Realisasi indikator kinerja penurunan emisi GRK tahun 2020, jika dibandingkan dengan target indikator kinerja penurunan emisi GRK pada Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tahun 2020 – 2024 telah mencapai sebesar 27,00 atau telah mencapai sebesar 1,35% dari target sebesar 5,00%.

Indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tahun 2020 ada 2 indikator, yaitu IKLH dan penurunan emisi GRK. Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. IKLH

   Realisasi indikator kinerja IKLH tahun 2020 ialah sebesar 68,94 dari target sebesar 67,62. IKLH dihitung dari beberapa indeks, yaitu:

   a. Indeks tutupan lahan

      Realisasi indeks tutupan lahan tahun 2020 ialah sebesar 41,24 dari target sebesar 57,59. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tahun 2020 sudah melaksanakan beberapa upaya untuk mencapai target indeks tutupan lahan, yaitu:

      1. Penanaman jenis pohon multi guna (MPTS) di destinasi wisata Danau Rusa seluas 10 Ha
      2. Pembangunan demplot revegetasi melalui pemberdayaan masyarakat di 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Pelalawan, Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir dengan jumlah luas lahan seluas 37, 5 Ha melalui program SMPEI (hibah GEF - IFAD) di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
      3. Pelatihan dan peningkatan kualitas kelompok masyarakat terkait pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (lebah madu dan aren)
      4. Pengembangan perbenihan di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) sebanyak 75.000 bibit

5. Pemeliharaan kebun buah dengan jenis tanaman durian, kelengkeng, mangga dan rambutan di UPT KPH Tasik Besar Serkap
6. Dukungan dari BPDASHL Indragiri - Rokan, diantaranya:
   a. Penanaman mangrove seluas 767 Ha melalui Program RHL dan Padat Karya
   b. Penyediaan bibit untuk penanaman RHL seluas ±1.462 Ha melalui KBR, KBD dan Bibit Produktif
   c. Penyediaan bibit melalui Persemaian Permanen sebanyak 559.495 batang untuk mendukung RHL masyarakat Provinsi Riau
   d. Pembangunan Kebun Bibit Desa Resort Dosan
7. Pembinaan MPA dan patroli wilayah rawan Karhutla dan perambahan hutan
8. Peningkatan dan pengembangan budidaya dan usaha Agroforestry serta HHBK (hibah dari World Bank)

Dalam mencapai indeks tutupan lahan ini terdapat juga beberapa permasalahan, diantaranya:

1. Penentuan indeks kualitas lahan masih dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan variabel dan metode penghitungan yang telah ditentukan, namun data hasil kegiatan RHL belum dilakukan pengolahan, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap variabel tipologi lahan maupun zonasi pemanfaatan lahan gambut yang digunakan dalam formula sebagai dasar penghitungan Indeks Kualitas Lahan (IKL)
2. Dukungan Program RHL di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau belum proporsional dengan luas lahan kritis yang sebesar ± 53.289 Ha

3. Kurangnya koordinasi dan kolaborasi yang mampu menciptakan sistem dan jaringan kerja untuk mengkompilasi capaian kinerja kegiatan terkait RHL yang dilakukan para pihak, baik OPD provinsi / kabupaten / kota, sektor swasta, mitra pembangunan dan kelompok peduli lingkungan yang melakukan kegiatannya di wilayah Provinsi Riau

b. Indeks kualitas air

Realisasi indeks kualitas air tahun 2020 ialah sebesar 50,23 dari target sebesar 58,30. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tahun 2020 sudah melaksanakan beberapa upaya untuk mencapai target indeks kualitas air, yaitu:

1. Melakukan pemantauan kualitas air sungai kewenangan provinsi yaitu:
    a. WS Reteh (Sungai Gangsal Hulu di Kabupaten Indragiri Hulu dan Sungai Gangsal Hilir di Kabupaten Indragiri Hulu)
    b. WS Bengkalis - Meranti (Sungai Kembung Luar di Kabupaten Bengkalis dan Sungai Suir di Kabupaten Kepulauan Meranti)
2. Melakukan pemantauan kualitas air danau, yaitu:
    a. Danau Meduyan di Kabupaten Indragiri Hulu
    b. Danau Nagasakti dan Zamrud di Kabupaten Siak
3. Melakukan pemantauan kualitas air laut, yaitu:
    a. Kota Dumai
    b. Pulau Rupat di Kabupaten Bengkalis
4. Pemantauan kualitas air sungai kewenangan pusat (Sungai Siak, Rokan, Kampar dan Indragiri), air laut dipantau oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan. Kabupaten / kota se Provinsi Riau melakukan kegatan pemantauan kualitas air sesuai kewenangan.

5. Melakukan pengawasan terhadap Pengendalian Pencemaran Air (PPA), Pengendalian Pencemaran Udara (PPU), pengelolaan limbah B3, ketaatan terhadap dokumen lingkungan, kesiap-siagaan Karhutla dan pengawasan perizinan lainnya pada 16 pemegang izin usaha / kegiatan kewenangan provinsi melalui kegiatan pengawasan Izin Lingkungan
6. Melakukan penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper), yaitu ketaatan kinerja perusahaan yang dievaluasi, antara lain ketaatan terhadap Pengendalian Pencemaran Air (PPA), Pengendalian Pencemaran Udara (PPU), pengelolaan limbah B3 dan ketaatan terhadap dokumen lingkungan. Peserta Proper sebanyak 135 perusahaan dengan rincian sebagai berikut:
   a. Pertambangan energi dan migas =15 perusahaan
   b. Perusahaan manufaktur, prasarana dan jasa = 4 perusahaan
   c. perusahaan agroindustri = 116 perusahaan

   Hasil penilaian peringkat ditetapkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK 460/MNLHK/SETJEN/KUM.1/12/2020 tanggal 11 Desember 2020, sebagai berikut:
   a. Emas = 1 perusahaan
   b. Hijau = 3 perusahaan
   c. Biru = 103 perusahaan
   d. Merah = 28 perusahaan

7. Membina dan mengevaluasi perizinan pengelolaan limbah B3 yang diterbitkan oleh kabupaten / Kota
8. Bersama-sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan verifikasi teknis perizinan pengeloaan limbah B3 kewenangan pusat di Kabupaten Pelalawan, Siak dan Kota Dumai
9. Melakukan verifikasi pemenuhan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis perusahaan dalam rangka penerbitan rekomendasi pengumpulan limbah B3 skala nasional di Kota Dumai atas nama perusahaan PT. Envitec Multi Indonesia
10. Penyaksiaan kondisi lubang galian sebelum ditutup/diurug, pengambilan dokumentasi kondisi lubang galian sebelum ditutup/diurug, penutupan/pengurugan lubang galian dan kondisi lubang galian setelah ditutup terkait aktivitas pemulihan lahan Terkontaminasi Minyak Bumi (TTM) sebanyak 20 lokasi di Kabupaten Siak dan supervisi pengambilan sampel terkait penanggulangan kedaruratan kebocoran air formasi akibat korosif pipa penyalur di area PT. Caltex Pacific Indonesia di Kabupaten Rokan Hilir melalui pemulihan Tanah Terkontaminasi Minyak (TTM) oleh PT. Chevron
11. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri merupakan tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri.

    Kegiatan menyusun Peraturan Gubernur Riau tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri. Rencana aksi diprioritaskan untuk bidang energi, manufaktur dan pertambangan emas skala kecil serta kesehatan (draft Peraturan Gubernur Riau).

12. Dalam rangka pengendalian limbah domestik yang berdampak terjadinya pencemaran melalui kegiatan Koordinasi Pengendalian Pencemaran Limbah Padat dan Domestik Provinsi Riau
13. Sosialisasi Peraturan Gubernur Riau Nomor 50 Tahun 2019 tentang Pembatasan Penggunaan Sampah Plasrik Sekali Pakai ke Kabupaten / Kota
14. Upaya pemulihan (restorasi) dalam upaya kuantitas dan kualitas air pada beberapa lokasi melalui kegiatan:
    a. Rehabilitasi di Daerah Aliran Sungai seluas 10 Ha di Kabupaten Kampar
    b. Revegetasi seluas 37,5 Ha melalui kegiatan Pengelolaan Ekosistem Lahan Gambut secara Berkelanjutan di Indonesia (*Sustainable Management of Peatland Ecosystems in Indonesia* / SMPEI) di Kabupaten Pelalawan, Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir
    c. Revegetasi melalui restorasi gambut di lahan bekas terbakar melalui kegiatan Tugas Pembantuan.

Dalam mencapai indeks kualitas air ini terdapat juga beberapa permasalahan, diantaranya:

1. Nilai IKA dan IKAL belum dihitung secara generalisasi seluruh pemantauan, baik kabupaten / kota, provinsi dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nilai IKA dan IKAL baru berdasarkan hasil pemantauan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau pada 2 tahap pemantauan.
2. Kondisi gambut di Provinsi Riau mempengaruhi tingginya beberapa parameter DO, pH dan TSS, sehingga mempengaruhi kualitas air

3. Limbah domestik yang meningkat mempengaruhi turunnya kualitas air
4. Aktivitas pertanian dan perkebunan dengan menggunakan pupuk berpotensi mempengaruhi turunnya kualitas air
5. Konversi lahan mempengaruhi fungsi *catchment area*
6. Pemantauan kualitas air laut beum memotret kualitas air laut se Provinsi Riau dan pemantauan dilakukan baru di 2 kabupaten / kota

c. Indeks kualitas udara

Realisasi indeks kualitas udara tahun 2020 ialah sebesar 90,42 dari target sebesar 90,30. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tahun 2020 sudah melaksanakan beberapa upaya untuk mencapai target indeks kualitas udara, yaitu:

1. Melakukan pengawasan terhadap Pengendalian Pencemaran Air (PPA), Pengendalian Pencemaran Udara (PPU), Pengelolaan limbah B3, ketaatan terhadap dokumen lingkungan, kesiap-siagaan Karhutla dan pengawasan perizinan lainnya pada 16 pemegang izin usaha / kegiatan kewenangan provinsi melalui kegiatan Pengawasan izin Lingkungan
2. Melakukan Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper). Ketaatan kinerja perusahaan yang dievaluasi, antara lain ketaatan terhadap Pengendalian Pencemaran Air (PPA), Pengendalian Pencemaran Udara (PPU), pengelolaan limbah B3 dan ketaatan terhadap dokumen lingkungan. Peserta Proper sebanyak 135 perusahaan, yaitu:

a. Pertambangan energi dan migas =15 perusahaan
b. Perusahaan manufaktur, prasarana dan jasa = 4 perusahaan
c. perusahaan agroindustri = 116 perusahaan

Hasil penilaian peringkat ditetapkan dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK 460/MNLHK/SETJEN/KUM.1/12/2020 tanggal 11 Desember 2020, sebagai berikut:

a. Emas = 1 perusahaan
b. Hijau = 3 perusahaan
c. Biru = 103 perusahaan
d. Merah = 28 perusahaan

3. Pengukuran kualitas udara ambien di 12 kabupaten / kota dengan metode *manual passive sampler* yang dilakukan pada 4 lokasi yang mewakili wilayah:
   a. Industri
   b. Pemukiman
   c. Transportasi
   d. Perkantoran

   Setiap kabupaten / kota dipasang untuk pengukuran 4 mewakili wilayah tersebut.
4. Alat pemantau kualitas udara statis / AQMS
5. Melakukan patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan di daerah rawan Karhutla
6. Melakukan monitoring peralatan pemadaman dalam upaya kesiap-siagaan Karhutla.
7. Upaya restorasi gambut pada 7 KHG melalui pembanguan sekat kanal sebagai upaya pencegahan terjadinya Karhutla dengan menjaga gambut agar tetap basah dengan:

a. Pembangunan sekat kanal melalui kegiatan Tugas Pembantuan / BRG
b. Pembangunan sekat kanal prioritas pada daerah rawan Karhutla di 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Pelalawan, Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir dengan sekat kanal sebanyak 194 unit yang dikerjakan melalui pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan Pengelolaan Ekosistem Lahan Gambut secara Berkelanjutan di Indonesia (*Sustainable Management of Peatland Ecosystems in Indonesia* / SMPEI) di Kabupaten Pelalawan, Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir
c. Revegetasi melalui restorasi gambut di lahan bekas terbakar melalui kegiatan Tugas Pembantuan

8. Melakukan sosialisasi pencegahan Karhutla di daerah rawan Karhutla

Dalam mencapai indeks kualitas udara ini terdapat juga permasalahan, yaitu 3 unit AQMS belum bisa digunakan karena tahun 2020 tidak terlaksana sparepart AQMS melalui tender cepat dengan 5 pemenang berdasarkan hasil evaluasi Pokja ULP. Kelima pemenang sudah dipanggil, tetapi tidak dapat memenuhi persyaratan teknis dan sparepart tidak tersedia di Indonesia, sehingga harus mendatangkan dari USA dengan waktu *shipping* yang lama. Selanjutnya untuk penayangan tender cepat kedua tidak cukup waktu mengingat pelaksanaan kegiatan kurang lebih 40 hari kalender.

2. Penurunan emisi GRK

Realisasi indikator kinerja penurunan emisi GRK tahun 2020 ialah sebesar 1,35% dari target sebesar 1,00%. Penurunan emisi GRK dihitung dari dua hal, yaitu:

a. Penurunan emisi GRK sektor limbah

Realisasi penurunan emisi GRK sektor limbah tahun 2020 ialah sebesar 1,03% dari target sebesar 1%. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tahun 2020 sudah melaksanakan beberapa upaya untuk mencapai target tersebut, yaitu:

1. Membuat laporan capaian Jakstrada Provinsi Riau dari tahun 2018 s/d 2025 dan wajib melaporkan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terlait pengurangan dan penangan sampah di Provinsi Riau
2. Membuat Peraturan Gubernur Riau Nomor 50 Tahun 2019 tentang Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai (PSP) di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Riau dan telah disosialisasikan ke seluruh OPD se Provinsi Riau berupa pengiriman hasil Peraturan Gubernur Riau terkait PSP dan penyebaran kuisioner terkait pelaksanaan PSP ke seluruh OPD di Provinsi Riau
3. Melakukan penanda-tanganan komitmen bersama seluruh OPD di lingkungan pemerintahan Provinsi Riau dalam penggunaan PSP pada peringatan HPSN tahun 2020
4. Sosialisasi Peraturan Gubernur Riau tentang PSP ke 12 kabupaten / kota di Provinsi Riau dan menyiapkan draft PSP kabupaten / kota, sehingga kabupaten / kota diharapkan dapat melakukan hal yang sama dalam PSP.
5. Dikeluarkannya Surat Edaran Gubernur Riau Nomor 176/SE/2019 tentang Pembatasan Penggunaan Sampah Plastik Sekali Pakai (PSP) di lingkungan Pemerintahan Provinsi Riau yang bertujuan untuk menggurangi timbulan sampah pada setiap acara / kegiatan di lingkup pemerintah Provinsi Riau.

6. Membina dan mengevaluasi 12 kabupaten / kota dalam pelaksanaan dan pengisian laporan capaian Jakstrada tahun 2019
7. Monitoring dan evaluasi kegiatan data pendukung pengurangan dan penanganan sampah 12 kabupaten / kota terkait data Jakstrada, berupa bank sampah, rumah kompos, TPS3R, PDU dan TPA

Dalam mencapai penurunan emisi GRK sektor limbah ini terdapat juga beberapa permasalahan, diantaranya:

1. Hasil capaian Jakstrada Provinsi Riau diisi berdasarkan hasil capaian 12 kabupaten / kota, namun masih ada kabupaten /kota yang Jakstradanya belum selesai dan belum mengirimkan ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau
2. Masih banyak OPD di lingkup pemerintah Provinsi Riau belum menerapkan PSP pada kegiatan maupun acara kantor
3. Hampir sebagian besar kabupaten / kota belum menerapkan PSP
4. Dalam hal capain pengurangan sampah masih sangat minim karena masih minimnya kepedulian masyarakat dalam mengelola sampah dari sumbernya, misal penerapan BS, rumah kompos, PDU dan sebagainya.
5. Sebagian TPA di kabupaten / kota masih ada yg open dumping
6. Sarana dan prasarana pengelolaan sampah di kabupaten / kota masih sangat kurang
7. Kurangnya pembinaan kepada masyarakat terkait pengurangan sampah dari sumbernya

b. Penurunan emisi GRK sektor kehutanan

Realisasi penurunan emisi GRK sektor kehutanan tahun 2020 ialah sebesar 1,14% dari target sebesar 1%. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tahun 2020 sudah melaksanakan beberapa upaya untuk mencapai target tersebut, yaitu:

1. Restorasi ekosistem dalam pemanfaatan sumberdaya alam dan jasa lingkungan serta restorasi lahan gambut dan RHL untuk perbaikan tutupan lahan dan pengendalian ancaman bencana dengan berbasis masyarakat
2. Memperbaiki dan mempertahankan DDDT – LH, terutama di wilayah hulu (*catchment area*) dan sempadan sungai agar fungsinya sebagai sistem penyangga kehidupan dapat berfungsi dengan baik
3. Mengefektifkan penanganan konflik pemanfaatan sumberdaya alam dan kawasan hutan untuk membuka akses legal bagi masyarakat dan kemandirian ekonomi masyarakat sekitar hutan
4. Berkembangnya perijinan melalui skema Perhutanan Sosial dan perdagangan karbon (*carbon trade*) membuka akses dan peluang kemandirian ekonomi masyarakat, termasuk hak kelola bagi masyarakat hukum adat.
5. Efektifnya pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau melalui Satgas Brigdalkarhutla
6. Upaya adaptasi dan mitigasi yang dilaksanakan dalam Program Kampung Iklim

Dalam mencapai penurunan emisi GRK sektor kehutanan ini terdapat juga beberapa permasalahan, diantaranya:

1. Keterbatasan dan validitas database sektor utama penyumbang energi dalam sign smart
2. Keterbatasan SDM analisis data
3. Belum ada Pokja Inventarisasi GRK Provinsi Riau

d. Dana

Efisiensi penggunaan sumberdaya dapat diukur dengan menggunakan perbandingan kinerja yang dihasilkan terhadap sumberdaya yang digunakan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.5. Realisasi kinerja dibandingkan dengan anggaran yang digunakan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Pagu	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	67,62	70,73	104,59	11.104.894.496,-	9.361.223.434,-	84,29
a	Meningkatnya tutupan lahan	Indeks tutupan lahan	57,59	41,24	71,61	9.707.622.556,-	8.551.665.614,-	88,09
b	Meningkatnya kualitas air	Indeks kualitas air	58,30	58,54	100,41	1.221.882.740,-	655.267.120,-	53,63
c	Meningkatnya kualitas udara	Indeks kualitas udara	90,30	90,36	100,07	175.389.200,-	154.290.700,-	87,97
2	Menurunnya emisi GRK	Persentase penurunan emisi GRK	1,00%	1,35%	135,00	13.114.052.808,-	4.491.003.856,-	34,25
a	Menurunnya emisi GRK sektor limbah	Persentase penurunan emisi GRK sektor limbah	1,00%	1,03%	103,00	392.623.000,-	302.601.044,-	77,07
b	Menurunnya emisi GRK sektor kehutanan	Persentase penurunan emisi GRK sektor kehutanan	1,00%	1,14%	114,00	12.721.429.808,-	4.188.402.812,-	32,92

Tabel 3.6. Tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	104,59	84,29	20,30
a	Meningkatnya tutupan lahan	Indeks tutupan lahan	71,61	88,09	- 16,48
b	Meningkatnya kualitas air	Indeks kualitas air	100,41	53,63	46,78
c	Meningkatnya kualitas udara	Indeks kualitas udara	100,07	87,97	12,10
2	Menurunnya emisi GRK	Persentase penurunan emisi GRK	135,00	34,25	100,75
a	Menurunnya emisi GRK sektor limbah	Persentase penurunan emisi GRK sektor limbah	103,00	77,07	25,93
b	Menurunnya emisi GRK sektor kehutanan	Persentase penurunan emisi GRK sektor kehutanan	114,00	32,92	81,08

Dari tabel 3.5. di atas dapat dilihat, bahwa capaian anggaran indikator kinerja IKLH tahun 2020 sebesar 84,29%, yaitu dari pagu sebesar Rp 11.104.894.496,- terealisasi sebesar Rp 9.361.223.434,- dan capaian anggaran indikator kinerja penurunan emisi GRK tahun 2020 sebesar 34,25%, yaitu dari pagu sebesar Rp 13.114.052.808,- terealisasi sebesar Rp 4.491.003.856,-.

Pada tabel 3.6. di atas dapat dilihat, bahwa tingkat efisiensi indikator kinerja IKLH tahun 2020 sebesar 20,30% dan tingkat efisiensi indikator kinerja penurunan emisi GRK sebesar 100,75%.

Program / kegiatan yang menunjang pencapaian indikator kinerja tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 3.7. Program / kegiatan yang menunjang pencapaian indikator kinerja tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
								Rp	%
1	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	67,62	70,73	104,59		11.104.894.496,-	9.361.223.434,-	84,29
a	Meningkatnya tutupan lahan	Indeks tutupan lahan	57,59	41,24	71,61		9.707.622.556,-	8.551.665.614,-	88,09
						Program perlindungan dan rehabilitasi hutan dan lahan	1.097.864.250,-	927.293.678,-	84,46
						Pengembangan Tanaman Lokal dan Tanaman Serba Guna (MPTS) di kawasan areal masyarakat hutan adat	122.785.000,-	22.236.400,-	18,11
						Pengembangan Sarana dan Prasarana Persemaian	63.360.000,-	63.360.000,-	100,00
						Pengembangan data dan Informasi Daerah Aliran Sungai	102.320.000,-	97.085.000,-	94,88
						Penanganan dan Penyelesaian Perkara/Kasus Tindak Pidana Kehutanan	299.409.250,-	280.158.826,-	93,57
						Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Sumber Dana DBH-DR	81.178.000,-	75.949.500,-	93,56
						Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Provisi Riau	152.310.000,-	126.107.000,-	82,80
						Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat	99.962.000,-	99.884.500,-	99,92
						Perlindungan dan Pengamanan Hutan	176.540.000,-	162.512.452,-	92,05
						Program Pemanfaatan Dan Penggunaan Kawasan Hutan	6.195.875.530,-	5.728.426.858,-	92,46
						Monitoring dan Validasi Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) Badan Usaha Bidang Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat	82.130.000,-	65.915.000,-	80,26

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
								Rp	%
						Asistensi Pengendalian Pelaksanaan RKU, RKT dan RPHD pada Perizinan Perhutanan Sosial	51.250.000,-	43.410.000,-	84,70
						Penyuluhan dan pengawasan perlindungan hutan pada Hutan Adat/HKm/Desa	102.800.000,-	72.803.000,-	70,82
						Penyusunan desain tapak pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam di Wilayah UPT KPH Rokan	207.023.000,-	204.879.736,-	98,96
						Pengembangan Jasa Ekowisata Sungai bersama Masyarakat Sekitar KPH Tasik Besar Serkap	901.660.000,-	894.985.800,-	99,26
						Pengembangan dan Pemeliharaan Pengelolaan Sarana Prasarana wisata Tahura SSH	374.000.000,-	372.926.000,-	99,71
						Inventarisasi Potensi Ekowisata dan Jasa Lingkungan di UPT KPH Suligi Batu Gajah	222.654.000,-	216.498.320,-	97,24
						Pengembangan Perhutanan Sosial di Provinsi Riau	124.545.000,-	100.354.675,-	80,58
						Penanganan, Pengukuran, dan Pengujian Perambahan Kawasan Hutan dan Hasil Hutan Ilegal	58.874.300,-	35.973.000,-	61,10
						Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT KPHP Minas Tahura	557.340.000,-	537.830.948,-	96,50
						Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT Pelatihan Kehutanan dan Pemberdayaan masyarakat	313.621.429,-	312.693.067,-	99,70
						Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT Perbenihan Tanaman Hutan	159.169.958,-	154.775.940,-	97,24

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
								Rp	%
						Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT KPH Bengkalis Pulau	259.474.174,-	233.477.382,-	89,98
						Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT KPH Mandau	220.986.122,-	162.196.810,-	73,40
						Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT KPH Rokan	181.606.000,-	178.267.004,-	98,16
						Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT KPH Kampar Kiri	174.996.000,-	167.402.400,-	95,66
						Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT KPH Sorek	117.800.000,-	92.577.000,-	78,59
						Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT KPH Tebing Tinggi	243.410.000,-	208.144.910,-	85,51
						Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT KPH Mandah	216.503.475,-	181.460.125,-	83,81
						Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT KPH Indragiri	211.058.872,-	189.467.420,-	89,77
						Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT KPH Singingi	213.181.000,-	182.346.460,-	85,54
						Peningkatan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT KPH Tasik Besar Serkap	260.950.000,-	247.433.103,-	94,82
						Peningkatan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT KPH Bagan Siapi-Api	217.929.500,-	205.942.912,-	94,50

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
								Rp	%
						Peningkatan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT KPH Bagan Siapi-Api	216.437.900,-	216.433.020,-	100,00
						Optimalisasi PNBP (Peningkatan Penerimaan Negara) Sektor Kehutanan	238.000.800,-	182.098.826,-	76,51
						Pengembangan Pembenihan	149.890.000,-	149.550.000,-	99,77
						Pelatihan dan Peningkatan Kualitas Kelompok Masyarakat Terkait Pelaksanaan Rehabilitasi hutan dan Lahan	118.584.000,-	118.584.000,-	100,00
						Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup	2.413.882.776,-	1.895.945.078,-	78,54
						Penataan dan Penanganan Kasus Lingkungan Hidup	101.871.000,-	100.513.384,-	98,67
						Asistensi KLHS Kabupaten/Kota	368.839.500,-	222.183.482,-	60,24
						Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	454.696.200,-	326.366.736,-	71,78
						Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Provinsi Riau (d/h SLHD)	200.216.200,-	129.840.100,-	64,85
						Pengembangan Kearifan lokal	112.745.400,-	92.187.300,-	81,77
						Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem	61.354.000,-	59.519.050,-	97,01
						Identifikasi Pengembangan dan Pengelolaan Program Riau Hijau di Provinsi Riau	761.121.000,-	640.873.380,-	84,20
						Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan kawasan bekas tambang rakyat	19.908.000,-	16.888.000,-	84,83
						Peningkatan peran serta masyarakat dalam	4.200.000,-	4.200.000,-	100,00

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
								Rp	%
						pengendalian kerusakan ekosistem kawasan pesisir dan laut			
						Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT. Laboratorium Lingkungan	147.506.000,-	133.413.846,-	90,45
						Pengelolaan Data Informasi dan perencanaan Program /Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	181.425.476,-	169.959.800,-	93,68
b	Meningkatnya kualitas air	Indeks kualitas air	58,30	58,54	100,41		1.221.882.740,-	655.267.120,-	53,63
						Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup	1.221.882.740,-	655.267.120,-	53,63
						Pemantauan Kualitas Lingkungan	462.624.000,-	336.531.520,-	72,74
						Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih	720.000,-	720.000,-	100,00
						Penilaian, Pembinaan dan Pengawasan AMDAL	133.503.340,-	62.630.600,-	46,91
						Pengawasan Izin Lingkungan	104.473.200,-	104.425.700,-	99,95
						Pengembangan Sarana Dan Prasarana UPT. Laboratorium Lingkungan	111.762.200,-	110.855.000,-	99,19
						Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Lingkungan Hidup	408.800.000,-	40.104.300,-	9,81
c	Meningkatnya kualitas udara	Indeks kualitas udara	90,30	90,36	100,07		175.389.200,-	154.290.700,-	87,97
						Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup	175.389.200,-	154.290.700,-	87,97
						Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	860.000,-	860.000,-	100,00
						pengembangan pendidikan lingkungan hidup	75.729.200,-	68.161.500,-	90,01

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
								Rp	%
						Pembinaan dan Pengembangan Program Kampung Iklim Provinsi Riau	98.800.000,-	85.269.200,-	86,30
2	Menurunnya emisi GRK	Persentase penurunan emisi GRK	1,00%	1,35%	135,00		13.114.052.808,-	4.491.003.856,-	34,25
a	Menurunnya emisi GRK sektor limbah	Persentase penurunan emisi GRK sektor limbah	1,00%	1,03%	103,00		392.623.000,-	302.601.044,-	77,07
						Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup	392.623.000,-	302.601.044,-	77,07
						Pembinaan Pengelolaan B3 dan Limbah B3	96.144.000,-	46.843.044,-	48,72
						Koordinasi pengendalian pencemaran limbah padat dan domestik Provinsi Riau	108.464.000,-	93.865.800,-	86,54
						Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	188.015.000,-	161.892.200,-	86,11
b	Menurunnya emisi GRK sektor kehutanan	Persentase penurunan emisi GRK sektor kehutanan	1,00%	1,14%	114,00		12.721.429.808,-	4.188.402.812,-	32,92
						Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup	344.503.000,-	220.968.200,-	64,14
						Penyusunan Profil Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Provinsi Riau	128.161.000,-	106.507.600,-	83,10
						Penyusunan Ded Dan Izin Lingkungan Laboratorium Lingkungan Upt. Laboratorium Lingkungan	216.342.000,-	114.460.600,-	52,91
						Program Perlindungan Dan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan	12.376.926.808,-	3.967.434.612,-	32,06
						Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Riau	2.750.418.000,-	1.198.734.870,-	43,58
						Patroli pencegahan	741.750.000,-	596.132.100,-	80,37

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
								Rp	%
						pengendalian kebakaran hutan dan lahan			
						Pengembangan Sarana dan Prasarana Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	6.332.577.700,-	2.742.300,-	0,04
						Penyelenggaraan Pencegahan Dan Penanggulangan Karhutla Upt Kph Suligi - Batu Gajah	225.000.000,-	219.310.000,-	97,47
						Penyelenggaraan Pencegahan Dan Penanggulangan Karhutla Upt Kph Model Tasik Besar Serkap	131.558.475,-	130.630.540,-	99,29
						Penyelenggaraan Pencegahan Dan Penanggulangan Karhutla Upt Kph Bagan Siapi-Api	235.000.000,-	216.357.700,-	92,07
						Penyelenggaraan Pencegahan Dan Penanggulangan Karhutla Upt Kph Bengkalis Pulau	235.100.000,-	231.821.312,-	98,61
						Penyelenggaraan Pencegahan Dan Penanggulangan Karhutla Upt Kph Mandau	235.200.000,-	136.374.035,-	57,98
						Penyelenggaraan Pencegahan Dan penanggulangan Karhutla Upt Kph Rokan	131.558.475,-	115.996.500,-	88,17
						Penyelenggaraan Pencegahan Dan Penanggulangan Karhutla Upt Kphp Minas Tahura	131.558.475,-	120.687.475,-	91,74
						Penyelenggaraan Pencegahan Dan Penanggulangan Karhutla Upt Kphp Kampar Kiri	131.558.475,-	117.450.000,-	89,28
						Penyelenggaraan Pencegahan Dan Penanggulangan Karhutla Upt Kphp Sorek	201.558.475,-	134.377.000,-	66,67
						Penyelenggaraan Pencegahan Dan Penanggulangan Karhutla Upt Kphp Tebing Tinggi	236.200.000,-	227.540.000,-	96,33
						Penyelenggaraan Pencegahan Dan Penanggulangan Karhutla Upt Kphp Mandah	235.020.000,-	207.162.800,-	88,15

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
								Rp	%
						Penyelenggaraan Pencegahan Dan Penanggulangan Karhutla Upt Kphp Indragiri	235.000.000,-	153.124.600,-	65,16
						Penyelenggaraan Pencegahan Dan Penanggulangan Karhutla Upt Kphp Singingi	165.791.083,-	136.915.730,-	82,58
						Rehabilitasi Mangrove (Dak)	22.077.650,-	22.077.650,-	100,00

Dari tabel di atas dapat dilihat, bahwa program / kegiatan yang menunjang pencapaian indikator kinerja IKLH tahun 2020 ialah Program perlindungan dan rehabilitasi hutan dan lahan, Program pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan serta Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dengan anggaran sebesar Rp 11.104.894.496,- dan realisasi sebesar Rp 9.361.223.434,- (84,29%) dan program / kegiatan yang menunjang pencapaian indikator kinerja penurunan emisi GRK tahun 2020 ialah Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dan Program perlindungan dan rehabilitasi hutan dan lahan dengan anggaran sebesar Rp 13.114.052.808,- dan realisasi sebesar Rp 4.491.003.856,- (34,25%).

3.2. Realisasi Anggaran

Pagu anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tahun 2020 sebesar Rp 150.907.573.641,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 132.013.986.148,- (87,48%) dan realisasi fisik sebesar 100%, terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 121.579.311.737,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 113.406.754.701,- (**93,28%**) dan realisasi fisik sebesar **100%** dan belanja langsung sebesar Rp 29.328.261.904,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 18.607.231.447,- (**63,44%**) dan realisasi fisik sebesar **69,17**%.

BAB IV
PENUTUP

4.1. Kesimpulan Umum

Pada tahun 2020, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap program dan kegiatan yang dialokasikan dalam belanja langsung, secara umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau telah mencapai kinerja tujuan kategori **sangat tinggi** di bidang pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan.

Realisasi dari target seluruh sasaran strategis dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tahun 2020 nilainya sangat tinggi, yaitu sasaran strategis Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dengan indikator kinerja IKLH dari target 67,62 terealisasi 70,73 (104,59) dan Menurunnya emisi GRK dengan indikator kinerja persentase penurunan emisi GRK dari target 1,00% terealisasi 1,35% (135,00).

Pagu anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tahun 2020 sebesar Rp 150.907.573.641,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 132.013.986.148,- (87,48%) dan realisasi fisik sebesar 100%, terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 121.579.311.737,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 113.406.754.701,- (93,28%) dan realisasi fisik sebesar 100% dan belanja langsung sebesar Rp 29.328.261.904,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 18.607.231.447,- (69,17%) dan realisasi fisik sebesar 69,17%.

4.2. Langkah Strategis

Dalam rangka mempertahankan sekaligus meningkatkan kinerja di masa mendatang sesuai dengan hasil analisis atas capaian kinerja tahun 2020, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau merumuskan langkah strategis sebagai pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan di masa yang akan datang, yaitu:

1. Dibangun mekanisme kolaborasi dan sinergi segenap potensi yang ada, sehingga capaian kinerja masing-masing pihak terkait, baik OPD provinsi dan kabupaten / kota, sektor swasta, LSM, kelompok masyarakat dan mitra pembangunan lainnya (filantropi) dapat dikompilasi menjadi indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau
2. Diupayakan dukungan kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas keberadaan UPT KPH agar dapat dikembangkan, sehingga mampu menggali potensi perolehan PAD guna mendukung pembiayaan pembangunan daerah dan masyarakat, khususnya di sektor lingkungan hidup dan kehutanan
3. Keberadaan kelompok masyarakat dan aktivitas lokalnya perlu terus dibina dan didokumentasikan dengan baik, sehingga dapat semakin menunjang capaian kinerja daerah di sektor lingkungan hidup dan kehutanan

LAMPIRAN - LAMPIRAN

DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN
DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVISI RIAU
T.A. 2020

A. KEGIATAN BIDANG PERUBAHAN IKLIM, PENGELOLAAN LIMBAH PADAT DOMESTIK

1. PEMANTAUAN SUNGAI WS. RETEH GANGSAL BAGIAN HULU

2. PEMANTAUAN SUNGAI WS. RETEH GANGSAL BAGIAN HILIR

3. PEMANTAUAN WS. BENGKALIS – MERANTI SUNGAI KEMBUNG LUAR

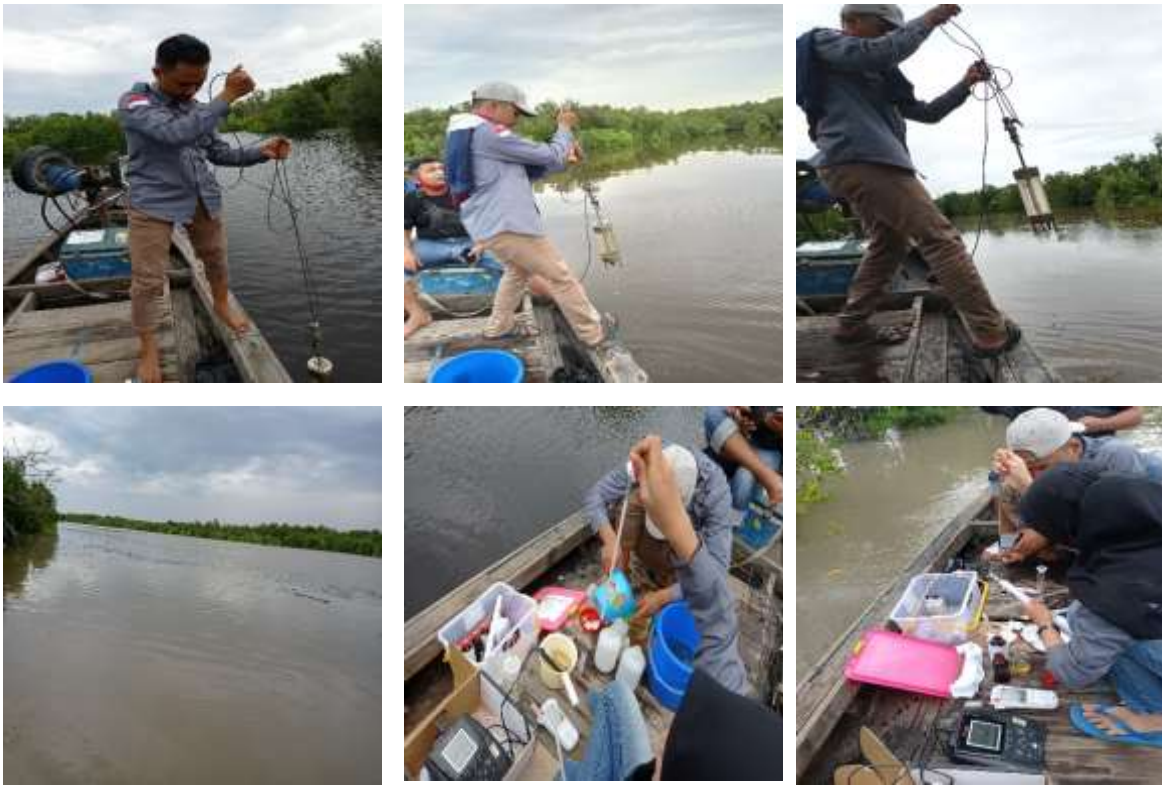

4. PEMANTAUAN WS. BENGKALIS – MERANTI SUNGAI SUIR

5. PEMANTAUAN KUALITAS AIR LAUT DUMAI DAN PULAU RUPAT

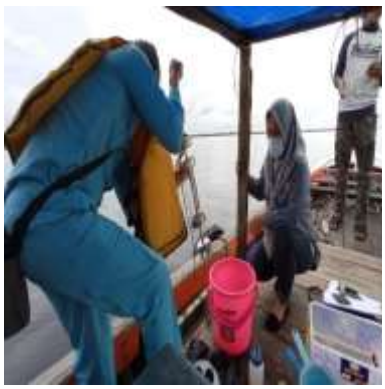

6. PEMANTAUAN KUALITAS AIR DANAU MEDUYAN

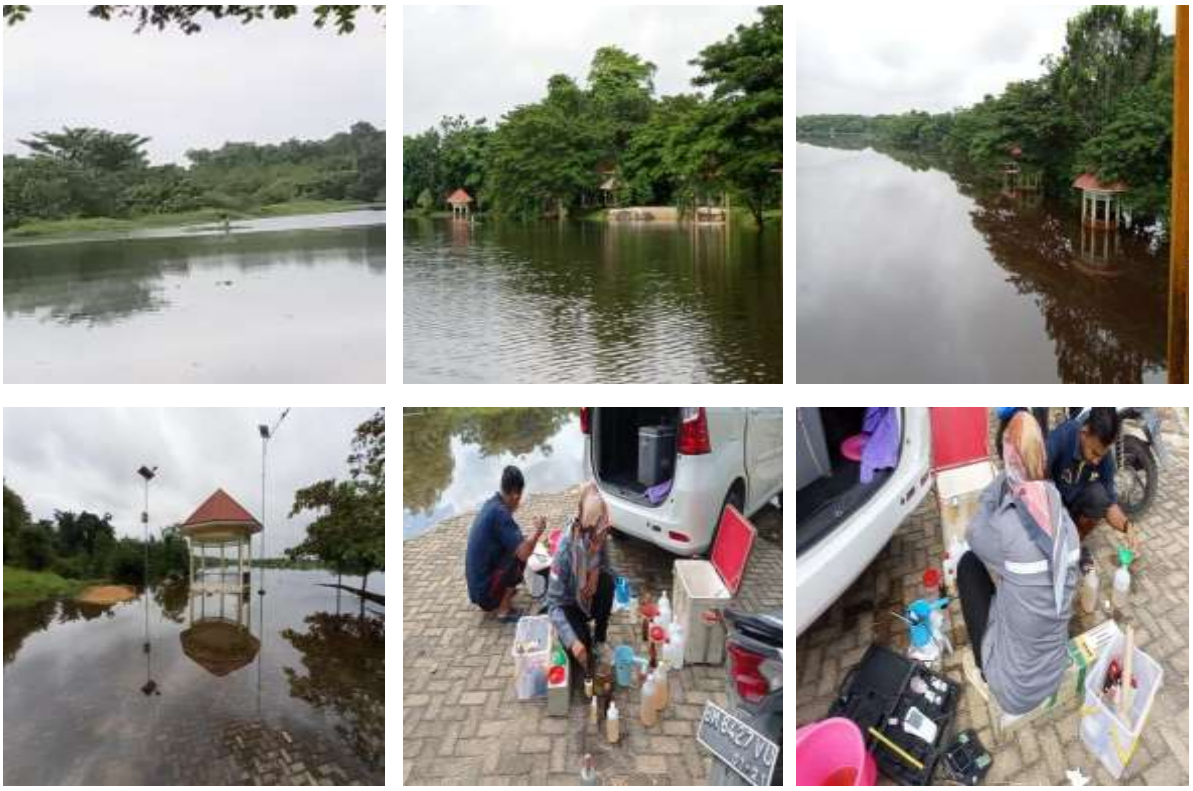

7. PEMANTAUAN KUALITAS AIR DANAU NAGASAKTI

8. PEMANTAUAN KUALITAS AIR DANAU ZAMRUD

9. KEGIATAN PENGAWASAN IZIN LINGKUNGAN

10. KEGIATAN PERSAMPAHAN

1). DOK. TIMBULAN SAMPAH DI TPA

2). DOK. BANK SAMPAH

3). EKONOMI KREATIF KERAJINAN DARI BAHAN SAMPAH

11. KEGIATAN KARHUTLA

B. KEGIATAN UPT PEMBENIHAN TANAMAN HUTAN

C. KEGIATAN UPT KPH MODEL TAHURA`

.

.

.

.

.

.

.

.